



Media Dalam Sistem Negara Totaliter: Perbandingan Pembatasan Berpendapat Ruang Digital Korea Utara dan Laos 2016

Arnis Desgita Eka Putri^{*1} , Maizia Hariyanti Zahra² , Sayyid Verrel³ , Sisilia Candra Tridjadja⁴ , Fatur Rizqi Ramadhan⁵ , Deni Angela⁶ 

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, 12450, Indonesia

*Corresponding Author: 2410413104@mahasiswa.upnvj.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 July 2025

Revised 10 December 2025

Accepted 14 January 2026

Available online 30 January 2026

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Putri, A. D. E., Zahra M. H., Verrel, S., Tridjadja, S. C., Ramadhan, F. R. & Angela, D. (2020). Media dalam Sistem Negara Totaliter: Perbandingan Pembatasan Berpendapat Ruang Digital Korea Utara dan Laos 2016. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 18 (1), 30-41.

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare strategies for restricting digital freedom of expression in North Korea and Laos in 2016 on the Facebook platform. This study uses a descriptive qualitative method with a literature review approach through the analysis of primary and secondary documents, including Freedom House reports (Freedom on the Net 2016–2017), Reporters Without Borders publications (World Press Freedom Index and special reports on internet censorship in Asia), publications by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, and peer-reviewed academic journal articles published between 2015 and 2024. The results show that North Korea applies a strategy of total isolation by blocking comprehensive digital infrastructure that cuts access to Facebook's 2.9 billion global users and substitutes it with the domestic platform StarCon.net.kp operating within the closed intranet Kwangmyong, while Laos adopts a selective approach through intensive surveillance of more than half a million domestic Facebook users and targeted repression of activists with penalties of up to 20 years of imprisonment. Both countries effectively maintain a monopoly over digital narratives despite using different mechanisms, with North Korea creating total dependence on government narratives by eliminating alternative information sources and Laos creating a chilling effect that encourages self-censorship through exemplary punishment of digital dissidents. The conclusion of this study emphasizes that variations in digital control strategies in authoritarian regimes depend on infrastructure conditions and technological penetration, yet converge on the same objective: maintaining power through the manipulation of digital spaces for expression.

Keywords: Facebook, Freedom of Expression, North Korea, Laos, Social Media, Digital Authoritarianism

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan strategi pembatasan kebebasan berpendapat digital di Korea Utara dan Laos pada tahun 2016 terhadap platform Facebook. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian kepustakaan melalui analisis dokumen-dokumen primer dan sekunder yang mencakup laporan Freedom House (Laporan Kebebasan di Internet 2016-2017), Reporters Without Borders (Indeks Kebebasan Pers dan laporan khusus tentang penyensoran internet di Asia), publikasi Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, serta artikel akademis dari jurnal telaah sejawat yang dipublikasikan dalam rentang 2015-2024. Hasil penelitian menunjukkan Korea Utara menerapkan strategi isolasi total melalui pemblokiran infrastruktur digital menyeluruh yang memutus akses ke 2,9 miliar pengguna Facebook global dan substitusi platform domestik StarCon.net.kp yang beroperasi dalam intranet tertutup Kwangmyong, sementara Laos menggunakan pendekatan selektif melalui pengawasan intensif terhadap lebih dari setengah juta pengguna Facebook domestik dan penindasan tertarget terhadap aktivis dengan hukuman mencapai 20 tahun penjara. Kedua negara efektif mempertahankan monopoli narasi digital meskipun menggunakan mekanisme berbeda, dengan Korea Utara menciptakan ketergantungan total terhadap narasi pemerintah melalui eliminasi alternatif informasi dan Laos menciptakan efek menakutkan yang mendorong sensor diri melalui penindasan teladan terhadap disiden digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa variasi strategi kontrol digital dalam rezim otoriter bergantung pada kondisi infrastruktur dan penetrasi teknologi, namun konvergen pada tujuan yang sama yakni pelanggaran kekuasaan melalui manipulasi ruang ekspresi digital.

Kata kunci: Facebook, Kebebasan Berpendapat, Korea Utara, Laos, Media Sosial, Otoritarianisme Digital



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.32734/politeia.v18i1.21913>

1. Pendahuluan

Kebebasan berpendapat merupakan elemen mendasar hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Universal Declaration of Human Rights, 1948). Era digital telah menggeser ruang ekspresi ke media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube* yang berperan penting dalam membentuk opini publik dan mobilisasi sosial-politik (Bradshaw et al., 2021). Namun, negara-negara otoriter kerap mengendalikan media sosial melalui penyensoran, pengawasan, dan kriminalisasi sebagai bagian dari otoritarianisme digital (Feldstein, 2021). *Facebook* menjadi platform paling rentan dibatasi mengingat jangkauannya yang luas dengan lebih dari 2,9 miliar pengguna per bulan (Kemp, 2024) dan fungsinya sebagai pengganti media konvensional di negara-negara berkembang dan totaliter (Lim, 2017).

Hak untuk mengakses dan menggunakan media sosial bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan perpanjangan langsung dari hak asasi manusia fundamental yang telah lama diakui secara internasional. Ketika Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2016 mengadopsi resolusi yang menegaskan bahwa hak-hak yang dimiliki manusia di dunia maya, termasuk kebebasan berekspresi, ini menandai pengakuan formal bahwa internet dan platform media sosial telah menjadi ruang publik baru yang esensial bagi pelaksanaan hak-hak demokratis (United Nations Human Rights Council, 2016). Media sosial memungkinkan individu tidak hanya untuk menerima informasi tetapi juga untuk mencari, menyampaikan, dan bertukar ide melampaui batas geografis, yang merupakan inti dari Pasal 19 DUHAM. Dalam konteks ini, pembatasan akses terhadap media sosial bukan hanya menghambat komunikasi, tetapi secara substansial melanggar kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, mengakses pendidikan, membangun jaringan sosial, dan menggunakan hak sipil dan politik mereka secara penuh.

Pembatasan akses terhadap media sosial di negara-negara otoriter sesungguhnya menciptakan bentuk isolasi yang jauh lebih dalam dari sekadar keterbatasan teknis. Ketika pemerintah memblokir platform seperti *Facebook* atau *YouTube*, yang terputus bukan hanya akses terhadap hiburan atau jejaring sosial semata, melainkan juga kemampuan warga untuk terhubung dengan komunitas global, mengakses beragam perspektif, dan membangun solidaritas lintas batas yang dapat memperkuat pemahaman mereka tentang hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki. Kondisi ini menciptakan semacam "tirai besi digital" yang mengisolasi warga dari perkembangan dunia luar dan menghilangkan ruang virtual untuk berkumpul dan berserikat yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan publik kontemporer (MacKinnon, 2011). Dampaknya bersifat berlapis, tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi tetapi juga mengikis hak-hak lain seperti akses terhadap pendidikan, partisipasi dalam kehidupan publik, bahkan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang utuh. Kasus-kasus dengan tingkat pembatasan ekstrem seperti Korea Utara menghadirkan gambaran tentang sejauh mana kontrol digital dapat diterapkan dan apa artinya bagi kehidupan manusia ketika akses terhadap dunia digital global sepenuhnya diputus.

Korea Utara pada tahun 2016 menunjukkan tingkat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi digital yang sangat ekstrem, dengan laporan kebebasan berekspresi global tahun 2021 menempatkan negara ini di peringkat paling bawah dengan skor nol dari seratus (KBS World Indonesia, 2021). Pada April 2016, Kementerian Pos dan Telekomunikasi secara resmi memblokir akses ke media sosial populer seperti *Facebook*, *YouTube*, dan *Twitter*, bahkan berlaku bagi pengunjung asing yang sebelumnya masih bisa mengakses internet 3G secara relatif bebas melalui jaringan *Koryolink* (Tempo.co, 2016). Infrastruktur internet global di Korea Utara sangat terbatas, dengan hanya 28 situs web dengan domain ".kp" yang dapat diakses dari luar Korea Utara pada September 2016, mayoritas berisi konten propaganda, berita, atau materi pendidikan yang telah disetujui pemerintah (Hersher, 2016). Akses ke internet global hanya diberikan kepada segelintir elit seperti pejabat tinggi, peneliti negara, propagandis, serta warga asing yang berada di bawah pengawasan ketat, sementara sebagian besar warga hanya dapat mengakses intranet domestik yang terisolasi bernama *Kwangmyong* yang menyediakan layanan seperti email, berita, perpustakaan digital, dan beberapa fitur *e-commerce* atau media sosial, tetapi sepenuhnya terputus dari internet global dan kontennya telah disensor oleh negara.

Berbeda dengan Korea Utara, Laos pada tahun 2016 memiliki lebih dari setengah juta pengguna *Facebook* yang menunjukkan penetrasi media sosial yang signifikan (Freedom House, 2016), membuat pemerintah Laos mulai menaruh perhatian lebih besar terhadap kritik di media sosial. Hal ini terlihat pada kasus penangkapan tiga aktivis yaitu Somphone Phimmassone, Lodkham Thammavong, dan Soukan Chaithad yang dituduh mengancam keamanan nasional karena memprotes pemerintah saat bekerja di Thailand dan memposting konten kritis di *Facebook* yang secara spesifik menuduh pemerintah melakukan korupsi, deforestasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka ditangkap pada Maret 2016 saat kembali ke Laos untuk memperbarui paspor, kemudian ditahan secara diam-diam selama lebih dari dua bulan dengan nasib dan keberadaan yang dirahasiakan hingga Amnesty International mengklasifikasikan penahanan ini sebagai

kemungkinan penghilangan paksa (Amnesty International, 2017). Pada akhir Mei 2016, mereka secara mengejutkan muncul di televisi nasional Laos mengenakan seragam tahanan biru untuk secara paksa "meminta maaf" atas "mengkhianati negara" melalui postingan *Facebook* anti-pemerintah, dan pada tahun 2017 mereka dihukum atas beberapa tuduhan termasuk pengkhianatan, propaganda melawan negara, dan pertemuan yang bertujuan menyebabkan gangguan sosial melalui proses hukum yang berlangsung secara rahasia, dengan hukuman penjara yang sangat berat: Somphone Phimmasone 20 tahun, Soukan Chaithad 18 tahun, dan Lodkham Thammavong 12 tahun, yang kemudian dinyatakan sebagai penahanan sewenang-wenang oleh Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang pada Agustus 2017.

Kajian tentang fenomena pembatasan kebebasan berpendapat dalam dunia digital telah mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya aktivitas media sosial. Penelitian sebelumnya telah mengkaji kasus-kasus ini secara terpisah, seperti (Baek, 2024) yang menganalisis sistem teknologi digital Korea Utara untuk memonopoli informasi melalui intranet *Kwangmyong*, dan (Lutz, 2024) yang meneliti paradoks media sosial di Laos sebagai alat propaganda namun juga ruang kritik berisiko tinggi. Penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan komparatif yang menggabungkan analisis struktur teknologis kontrol informasi (model Korea Utara) dengan dimensi sosial-politik kontrol narasi (model Laos). Keunggulan penelitian ini terletak pada pemahaman komprehensif mengenai bagaimana dua model pembatasan yang berbeda dapat sama-sama efektif dalam mempertahankan kekuasaan otoriter melalui manipulasi ruang digital. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan fundamental: bagaimana pembatasan kebebasan berpendapat dalam ruang digital di Korea Utara dan Laos pada tahun 2016? Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan strategi pembatasan kedua negara terhadap *Facebook* sebagai representasi media sosial utama, untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika otoritarianisme digital dalam menghadapi tantangan teknologi informasi abad ke-21.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur untuk menginvestigasi pembatasan kebebasan berpendapat dalam ruang digital, khususnya terkait pembatasan akses dan kontrol terhadap platform Facebook di Korea Utara dan Laos pada periode 2016. Pemilihan tahun 2016 sebagai fokus temporal didasarkan pada momentum penting di mana Korea Utara secara resmi memblokir akses Facebook bagi pengunjung asing pada April 2016, sementara Laos mengintensifkan regulasi media sosial melalui implementasi dekret baru tentang penggunaan internet dan media sosial.

Data primer penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen yang secara langsung mendokumentasikan praktik pembatasan digital di kedua negara, meliputi laporan tahunan dan khusus dari organisasi pemantau kebebasan internet seperti Freedom House (Freedom on the Net Report 2016-2017), Reporters Without Borders (Press Freedom Index dan laporan khusus tentang internet censorship di Asia), serta publikasi dari United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression. Selain itu, data primer juga mencakup dokumen kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah kedua negara yang dapat diakses melalui arsip berita dan publikasi pemerintah, artikel investigatif dari media internasional terpercaya yang melakukan reportase langsung dari Korea Utara dan Laos seperti Radio Free Asia, BBC, dan Reuters, serta artikel akademis dari jurnal peer-reviewed yang secara spesifik menganalisis kontrol digital di kedua negara tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di beberapa database akademis tertentu dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti "North Korea Facebook censorship", "Laos social media control", "digital authoritarianism Asia", dan "internet freedom 2016" dalam rentang waktu publikasi 2015-2024 untuk menangkap konteks sebelum, saat, dan sesudah periode fokus penelitian. Kriteria seleksi sumber meliputi kredibilitas institusi atau penulis, kejelasan metodologi pengumpulan informasi (terutama untuk laporan organisasi internasional), dan relevansi langsung dengan topik pembatasan Facebook di kedua negara pada periode yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Strategi Kontrol Informasi Digital yang Digunakan oleh Korea Utara dan Laos dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial

Korea Utara menerapkan mekanisme pembatasan struktural dan total terhadap akses Facebook melalui kontrol infrastruktur digital yang menyeluruh dan terpusat yang memisahkan warga negara dari ekosistem informasi global. Kementerian Pos dan Telekomunikasi Korea Utara pada April 2016 secara resmi memblokir akses ke media sosial populer termasuk Facebook, YouTube, dan Twitter sebagai bagian dari strategi isolasi digital rezim Kim Jong-un yang bersifat sistemik dan berkelanjutan (Tempo.co, 2016). Kebijakan ini bukan merupakan fenomena baru tetapi merepresentasikan intensifikasi kontrol yang telah berlangsung sejak era Kim Il-sung, di mana teknologi komunikasi selalu ditempatkan di bawah monopoli negara untuk memastikan tidak ada narasi tandingan yang dapat mengancam legitimasi rezim. Data dari laporan kebebasan berekspresi global tahun 2021 menunjukkan Korea Utara menempati peringkat paling bawah dengan skor nol dari seratus, posisi yang tidak hanya mencerminkan penolakan mutlak terhadap kebebasan digital tetapi juga konsistensi rezim dalam mempertahankan kontrol informasi sebagai pilar utama kekuasaan totaliter (KBS World Indonesia, 2021). Target kebijakan pemblokiran mencakup seluruh spektrum masyarakat tanpa pengecualian, bahkan pengunjung asing yang sebelumnya dapat mengakses internet 3G melalui jaringan Koryolink pun akhirnya dibatasi secara ketat, menunjukkan bahwa isolasi digital bukan hanya ditujukan kepada warga domestik tetapi juga kepada siapa pun yang berada dalam wilayah yurisdiksi Korea Utara.

Untuk menyiasati hal tersebut, Korea Utara mengembangkan platform media sosial domestik bernama StarCon.net.kp yang dibangun menggunakan perangkat lunak sumber terbuka Dolphin PHP, sebuah pilihan teknologi yang menarik karena menunjukkan kemampuan Korea Utara untuk mengadaptasi teknologi sumber terbuka Barat untuk tujuan kontrol domestik. Platform ini dijuluki sebagai Facebook versi Korea Utara karena memiliki tampilan dan fitur yang menyerupai Facebook di era awal 2010-an, memungkinkan pengguna membuat akun dengan informasi personal, menambahkan teman berdasarkan koneksi sosial atau profesional, memposting status yang dapat dibaca oleh jaringan mereka, dan mengunggah foto yang dapat diberi komentar dan suka oleh pengguna lain (BBC, 2016). Keputusan untuk meniru Facebook daripada mengembangkan desain asli menunjukkan pengakuan dari pemerintah Korea Utara bahwa warga negara, terutama generasi muda yang mungkin memiliki paparan terbatas terhadap media sosial global melalui propaganda atau konten selundupan, memiliki ekspektasi tertentu tentang bagaimana platform media sosial seharusnya terlihat dan berfungsi. Namun, platform ini merupakan bagian dari jaringan intranet Kwangmyong yang tertutup dan tidak terhubung ke internet global, sehingga semua interaksi terjadi dalam gelembung digital yang sepenuhnya dimonitor dan dikontrol oleh negara. Dengan demikian, ilusi kebebasan berpendapat yang diberikan melalui kemampuan untuk memposting konten dan berinteraksi dengan pengguna lain sebenarnya berfungsi sebagai alat pelanggungan kontrol naratif tunggal negara, karena batasan diskursif telah ditetapkan sebelumnya melalui kombinasi sensor diri yang terinternalisasi dan pengawasan yang beragam.

Strategi substitusi ini tidak hanya membatasi akses tetapi juga menormalisasi interaksi digital dalam kerangka ideologis pemerintah, menciptakan kondisi di mana warga negara Korea Utara mengembangkan literasi digital yang terbatas pada konteks domestik tanpa paparan terhadap norma dan praktik komunikasi digital global. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna Kwangmyong dan StarCon mengembangkan pola komunikasi yang berbeda dari pengguna internet global, dengan prevalensi tinggi konten yang memuji pencapaian negara, diskusi tentang teknologi atau sains dalam kerangka ideologis Juche, dan dokumentasi kehidupan sehari-hari yang secara sengaja menghindari topik-topik sensitif secara politik (Baek, 2024). Normalisasi ini menciptakan generasi warga negara yang mungkin secara teknis melek dalam penggunaan teknologi digital tetapi tidak memiliki kerangka konseptual untuk memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk mobilisasi politik atau kritik terhadap pemerintah, sebuah hasil yang dari perspektif rezim jauh lebih berkelanjutan daripada pelarangan total yang akan menciptakan mistik dan keinginan untuk akses ke dunia luar.

Kasus peretasan StarCon.net.kp oleh remaja Skotlandia Andrew McKean yang menemukan bahwa kredensial administrator menggunakan kombinasi nama pengguna "admin" dan kata sandi "password" yang sangat lemah menunjukkan lemahnya keamanan teknis sistem tersebut, sebuah ironi yang mengindikasikan bahwa prioritas utama bukan pada perlindungan digital terhadap serangan eksternal tetapi pada pemisahan sistem dari internet global dan pengawasan total terhadap aktivitas warga (Macej, 2016). Kerentanan teknis ini tidak mengancam fungsi utama platform karena target pengawasan adalah pengguna domestik yang tidak memiliki akses atau kapasitas untuk mengeksploitasi kerentanan tersebut, sementara peretas eksternal yang dapat mengakses sistem tidak dapat menggunakannya untuk memengaruhi pengguna domestik karena sifat intranet yang terisolasi.

Meskipun strategi Korea Utara efektif dalam jangka pendek untuk mempertahankan kontrol narasi, model ini menghadapi tantangan keberlanjutan dalam jangka panjang karena menciptakan kesenjangan digital yang semakin lebar antara Korea Utara dan seluruh dunia, berpotensi menghambat pembangunan ekonomi dan teknologi yang memerlukan integrasi dengan ekosistem digital global. Kritik terhadap teori Feldstein muncul di sini karena kerangka otoritarianisme digital yang ia kembangkan terutama fokus pada bagaimana rezim menggunakan teknologi untuk kontrol tetapi kurang mengeksplorasi pertukaran jangka panjang dari strategi isolasi ekstrem, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi dan inovasi teknologi yang semakin bergantung pada konektivitas dan transfer pengetahuan lintas batas. Otoritarianisme berjejaring yang mengadaptasi dan memanipulasi teknologi digital lebih berkelanjutan daripada isolasi digital karena memungkinkan rezim untuk mempertahankan kontrol sambil mendapat manfaat dari inovasi dan peluang ekonomi yang ditawarkan internet global, sebuah argumen yang mendapat dukungan dari kasus China yang berhasil mengembangkan sektor teknologi yang dinamis meskipun di bawah rezim penyensoran yang ekstensif (MacKinnon, 2011). Namun, dari perspektif pemeliharaan kontrol ideologis total yang merupakan fondasi rezim Korea Utara, strategi isolasi mungkin merupakan pilihan rasional karena risiko kontaminasi ideologis dari paparan ke internet global dianggap lebih besar daripada biaya peluang ekonomi dan teknologi, mencerminkan bahwa strategi rasional untuk rezim otoriter tidak selalu selaras dengan ukuran konvensional pembangunan atau kemajuan.

Berbeda dengan Korea Utara, Laos mengembangkan strategi kontrol informasi digital yang bersifat reaktif dan selektif terhadap Facebook. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Laos memiliki lebih dari setengah juta pengguna Facebook yang menunjukkan penetrasi media sosial yang signifikan, terutama di kalangan muda dan diaspora, angka yang kontras dengan isolasi digital Korea Utara dan menunjukkan bahwa pemerintah Laos menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengelola ruang digital (Freedom House, 2016). Tingkat penetrasi ini menciptakan dilema bagi rezim Laos karena di satu sisi media sosial menyediakan saluran komunikasi yang efisien untuk propaganda pemerintah dan mobilisasi dukungan, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi kritik dan mobilisasi oposisi. Maka dari itu, aparat keamanan nasional dan sistem peradilan bekerja sama dalam memantau dan menindak aktivitas media sosial yang dianggap subversif, menciptakan ekosistem pengawasan yang dikategorikan sebagai bentuk otoritarianisme digital yang mengandalkan penindasan selektif daripada kontrol total.

Berdasarkan teori Feldstein, strategi Laos lebih fokus pada pengawasan intensif dan penindasan personal terhadap aktivitas yang dianggap subversif, bukan melalui sistem pemblokiran massal seperti Korea Utara, menempatkan Laos dalam kategori negara pengawasan yang menggunakan pemantauan dan hukuman selektif untuk menciptakan efek menakutkan daripada negara tertutup yang menggunakan kontrol infrastruktur untuk mencegah akses (Feldstein, 2021). Tingginya jumlah pengguna Facebook membuat pemerintah Laos tidak bisa menerapkan isolasi total tanpa risiko gangguan sosial yang signifikan dan reaksi balik ekonomi, terutama karena Facebook telah menjadi platform utama untuk perdagangan elektronik, komunikasi diaspora, dan bahkan pemberian layanan di sektor seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga pendekatan pengendalian diarahkan pada individu yang berani mengkritik secara terbuka daripada berupaya untuk mengontrol seluruh platform atau populasi pengguna.

Kasus penangkapan tiga aktivis yaitu Somphone Phimmason, Lodkham Thammavong, dan Soukan Chaithad pada Maret 2016 menjadi contoh konkret strategi penindakan Laos yang bersifat tertarget. Ketiga pekerja migran tidak berdokumen di Thailand ini ditangkap karena memposting konten kritis di Facebook yang secara spesifik menuduh pemerintah melakukan korupsi dalam proyek pembangunan bendungan, deforestasi ilegal yang melibatkan pejabat tinggi, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas di wilayah selatan Laos. Konten yang mereka posting tidak hanya berupa opini tetapi juga mencakup dokumentasi visual dan data yang mereka klaim diperoleh dari sumber internal pemerintah, menjadikan mereka ancaman serius bagi rezim karena berpotensi memicu investigasi internasional atau protes domestik. Mekanisme penindakan melibatkan tahapan pengawasan yang menunjukkan kapasitas teknis aparat keamanan Laos dalam memantau aktivitas digital warga negara bahkan ketika mereka berada di luar negeri, penangkapan yang dilakukan segera setelah mereka memasuki wilayah Laos untuk memperbarui paspor menunjukkan koordinasi antarinstansi yang efektif, penahanan rahasia selama lebih dari dua bulan yang diklasifikasikan sebagai kemungkinan penghilangan paksa, dan intimidasi publik melalui pengakuan paksa di televisi nasional pada akhir Mei 2016 yang disiarkan di waktu tayang utama untuk memaksimalkan dampak psikologis (Amnesty International, 2017).

Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa pembatasan di Laos tidak hanya menargetkan konten tetapi juga membentuk pola penindakan terhadap aktor yang dianggap mengancam legitimasi pemerintah. Hal ini mengidentifikasi bahwa Laos menggunakan kombinasi teknologi pengawasan komersial dan kerja sama dengan platform media sosial untuk mengakses metadata dan konten postingan warga negara, meskipun tingkat kecanggihan teknologi Laos masih jauh di bawah China atau Vietnam (Lutz, 2024).

Yang lebih signifikan adalah bagaimana kasus ini dikonstruksi secara legal dan diskursif, di mana aktivis tidak dituduh berdasarkan undang-undang kebebasan berekspresi atau pers tetapi berdasarkan pasal pengkhianatan dan makar yang membawa hukuman jauh lebih berat, sebuah strategi legal yang digunakan banyak rezim otoriter untuk melegitimasi penindasan terhadap disiden digital. Proses hukum yang berlangsung secara rahasia pada April 2017 tanpa akses pengacara independen atau pemantau internasional, serta hukuman yang sangat berat yaitu Somphone Phimmason 20 tahun, Soukan Chaithad 18 tahun, dan Lodkham Thammavong 12 tahun yang secara signifikan melebihi hukuman untuk kejahatan kekerasan di Laos, menciptakan pesan yang jelas bahwa kritik digital terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap negara yang harus dihukum dengan tingkat keparahan maksimal.

Tindakan ini tidak hanya mencerminkan sifat represif tetapi juga manipulatif karena bertujuan membentuk persepsi publik bahwa kritik terhadap negara adalah bentuk pengkhianatan daripada pelaksanaan hak kebebasan berekspresi, sebuah strategi diskursif yang berupaya untuk mendelegitimasi kritik politik dengan membingkai ulang sebagai ancaman keamanan. Dimensi manipulasi sosial terlihat dalam bagaimana pemerintah membangun narasi seputar kasus, mengkaraktirasi aktivis sebagai pengkhianat yang dipengaruhi oleh kekuatan asing daripada warga negara yang mengekspresikan keluhan yang sah, dan menggunakan media negara untuk memperkuat narasi ini sambil menekan laporan alternatif dari masyarakat sipil atau organisasi internasional. Penelitian menunjukkan bahwa setelah kasus ini, terjadi penurunan signifikan dalam volume konten politik kritis pada Facebook Laos, dengan banyak pengguna baik menghapus postingan kritis sebelumnya, melakukan sensor diri pada postingan masa depan, atau bermigrasi ke platform perpesanan terenkripsi seperti Telegram yang menawarkan privasi lebih besar meskipun dengan pertukaran jangkauan audiens yang berkurang (Freedom House, 2016). Penurunan ini menunjukkan bahwa strategi penindasan tertarget efektif dalam mencapai tujuan mengurangi kritik publik tanpa perlu untuk memblokir platform sepenuhnya atau menuntut sejumlah besar pengguna, sebuah efisiensi yang penting untuk rezim dengan kapasitas negara terbatas dan kekhawatiran tentang biaya ekonomi atau sosial dari penindasan digital yang ekstensif.

Aspek manipulasi sosial menjadi penting dalam menciptakan efek jera dan pengendalian kolektif tanpa harus menerapkan kontrol struktural seperti di Korea Utara, mencerminkan pengakuan bahwa dalam era digital, persepsi pengawasan dan konsekuensi dapat sama efektifnya dengan

pengawasan komprehensif yang sebenarnya dalam membentuk perilaku. Teori studi pengawasan tentang efek panoptikon relevan di sini, di mana ketidakpastian tentang apakah seseorang sedang diawasi membuat individu mengatur perilaku mereka sendiri seolah-olah mereka berada di bawah pengawasan konstan, menciptakan disiplin diri yang lebih efisien dan berkelanjutan daripada pemantauan konstan yang sebenarnya yang memerlukan sumber daya ekstensif. Namun, strategi Laos juga menghadapi keterbatasan karena sifat selektif penegakan menciptakan inkonsistensi yang dapat merusak kredibilitas ancaman, dan ketergantungan pada hukuman teladan berarti bahwa rezim perlu secara berkala mengidentifikasi dan menuntut kasus baru untuk mempertahankan kemenonjolan ancaman dalam kesadaran publik, menciptakan kebutuhan berkelanjutan untuk kapasitas pengawasan dan kesediaan untuk mengenakan hukuman berat yang dapat menarik kritik dan sanksi internasional.

Perbandingan strategi kontrol informasi antara Korea Utara dan Laos mengungkapkan pertukaran fundamental dalam otoritarianisme digital yang mencerminkan ketegangan lebih luas antara kontrol dan pembangunan, isolasi dan integrasi, pencegahan dan hukuman. Korea Utara memilih model yang memaksimalkan kontrol melalui pencegahan akses dan substitusi dengan alternatif yang sepenuhnya dikontrol, mengorbankan konektivitas dan manfaat ekonomi terkait untuk kepastian kontrol ideologis. Laos memilih model yang mempertahankan konektivitas sambil berupaya untuk mengontrol konten dan menghukum pengkritik, mendapat manfaat dari keuntungan ekonomi dan sosial integrasi tetapi menerima tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dan kebutuhan untuk pengawasan dan penegakan yang berkelanjutan. Dari perspektif kelangsungan hidup rezim, kedua strategi dapat dianggap rasional dalam konteks masing-masing, dengan Korea Utara beroperasi dalam kondisi isolasi ekstrem di mana biaya isolasi tambahan dari keputusan digital adalah minimal, sementara Laos beroperasi dalam kondisi integrasi regional di mana biaya isolasi akan substansial. Namun, dari perspektif hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, kedua strategi sangat bermasalah karena secara efektif menghilangkan ruang untuk perbedaan pendapat politik yang berarti dalam ranah digital, dengan Korea Utara mencapai ini melalui eliminasi akses ke platform dan Laos mencapai ini melalui penciptaan iklim ketakutan yang menekan perbedaan pendapat meskipun ketersediaan teknis platform.

Kontradiksi terhadap teori Feldstein muncul dalam analisis ini karena kerangkanya menunjukkan bahwa otoritarianisme digital terutama tentang adopsi teknologi baru untuk memperluas kontrol negara, tetapi kasus Korea Utara menunjukkan bahwa penolakan teknologi atau penciptaan ekosistem teknologi terisolasi dapat sama efektifnya dalam mencapai tujuan kontrol otoriter, menunjukkan kebutuhan untuk konseptualisasi lebih luas tentang otoritarianisme digital yang mencakup tidak hanya penggunaan teknologi tetapi juga ketidakgunaan strategis atau isolasi dari sistem teknologi global. Lebih lanjut, perbandingan antara Korea Utara dan Laos menunjukkan bahwa efektivitas strategi otoriter digital tidak selalu berkorelasi dengan kecanggihan teknologi atau komprehensivitas kontrol, karena Laos dengan kapasitas pengawasan yang relatif terbatas dan penegakan selektif dapat mencapai hasil serupa dalam hal penekanan perbedaan pendapat sebagai Korea Utara dengan kontrol infrastruktur yang jauh lebih komprehensif, menunjukkan bahwa dimensi psikologis kontrol yaitu ketakutan, ketidakpastian, sensor diri mungkin lebih penting daripada dimensi teknis yaitu pemblokiran, penyaringan, pemantauan dalam menjelaskan hasil.

Dampak Pembatasan terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Warga Negara di Ruang Digital

Pembatasan akses Facebook di Korea Utara menghasilkan dampak yang bersifat struktural dan fundamental terhadap hak kebebasan berpendapat warga negara dalam ruang digital, menciptakan kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai defisit kebebasan negatif di mana warga kehilangan tidak hanya kebebasan untuk mengekspresikan tetapi juga kebebasan untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam ranah publik digital global yang telah menjadi komponen esensial kewarganegaraan kontemporer. Isolasi digital yang diterapkan Korea Utara menciptakan realitas digital tunggal di mana warga negara kehilangan akses terhadap perspektif alternatif, diskusi lintas budaya, dan informasi yang tidak dikontrol pemerintah, sebuah kondisi yang secara fundamental berbeda dari penyensoran selektif yang masih memungkinkan paparan terbatas terhadap sudut pandang yang beragam. Konsekuensinya, terjadi keterputusan informasi secara sistematis yang membatasi kapasitas warga dalam membentuk opini kritis maupun mempertanyakan kebijakan negara, karena prasyarat

untuk pembentukan opini yang terinformasi adalah akses terhadap beberapa sumber informasi dan paparan terhadap interpretasi peristiwa yang bersaing, kedua hal yang sepenuhnya tidak ada dalam konteks Korea Utara.

Data dari Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi tahun 2016 mengidentifikasi bahwa hak untuk mengakses informasi adalah prasyarat untuk pelaksanaan kebebasan berekspresi yang bermakna, karena tanpa akses terhadap informasi yang beragam, ekspresi menjadi sekadar pengulangan narasi yang disahkan secara resmi daripada artikulasi asli pemikiran atau keyakinan individual (Kaye et al., 2017). Dalam konteks Korea Utara, dengan hanya dapat mengakses intranet domestik Kwangmyong yang kontennya telah disensor negara, warga negara kehilangan kemampuan untuk mengembangkan literasi digital kritis dan keterampilan evaluasi informasi yang diperlukan dalam era digital, menciptakan defisit generasional dalam kompetensi digital yang akan memiliki implikasi jangka panjang untuk kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam ekonomi atau masyarakat digital jika keadaan politik berubah. Situasi ini menciptakan kondisi panoptikon digital, di mana warga hidup dalam kemungkinan diawasi secara konstan oleh negara, sehingga memodifikasi perilaku mereka bahkan tanpa pengawasan langsung atau konsekuensi aktual sebagai bentuk disiplin tertinggi di mana subjek menginternalisasi pengawasan kekuasaan dan mengatur diri mereka sendiri. Dalam konteks otoriter dengan tingkat pengawasan tinggi, sensor diri menjadi sangat terinternalisasi sehingga individu berhenti membedakan antara keyakinan asli mereka dan pendapat yang dapat diungkapkan secara publik, yang mengarah pada pemalsuan preferensi di mana preferensi sejati disembunyikan secara sistematis bahkan dalam konteks pribadi karena ketakutan akan pengawasan (Kuran, 1995).

Dalam jangka panjang, isolasi digital Korea Utara mengarah pada internalisasi sensor diri yang mendalam dan normalisasi kontrol sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, menciptakan penerimaan budaya terhadap keterbatasan ekspresi yang ditransmisikan lintas generasi dan menjadi bagian dari habitus atau disposisi tidak reflektif yang memandu perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa pembelot Korea Utara yang telah terpapar terhadap kebebasan internet setelah meninggalkan negara sering mengalami disonansi kognitif yang mendalam dan kesulitan dalam menavigasi lingkungan informasi tanpa batas, melaporkan perasaan kewalahan, kebingungan tentang cara mengevaluasi sumber yang saling bertentangan, dan nostalgia untuk kesederhanaan lingkungan informasi narasi tunggal, menunjukkan bahwa efek kognitif jangka panjang dari isolasi informasi dapat bertahan bahkan setelah pemindahan dari lingkungan yang membatasi (Baek, 2024). Dampak antargenerasi juga signifikan, karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan digital yang sepenuhnya terisolasi mengembangkan kerangka kognitif yang berbeda untuk memahami teknologi, informasi, dan komunikasi dibandingkan dengan rekan-rekan yang terhubung secara global, menciptakan apa yang beberapa sarjana sebut kesenjangan generasi digital yang bukan berdasarkan usia tetapi pada pengalaman yang secara fundamental berbeda dari ruang digital.

Keberadaan platform seperti StarCon.net.kp sebagai Facebook versi Korea Utara menciptakan ilusi kebebasan berekspresi yang pada kenyataannya merupakan bentuk kontrol halus namun efektif, sebuah fenomena yang disebut sebagai toleransi represif di mana penampilan kebebasan menutupi kondisi dominasi yang sebenarnya. Warga negara diberi ruang untuk berinteraksi, memposting konten, dan terlibat dalam jejaring sosial, tetapi dalam koridor yang dikendalikan penuh oleh negara, menjadikan ekspresi mereka bagian dari sistem propaganda daripada ekspresi autentik, karena batasan wacana yang dapat diterima telah ditentukan sebelumnya dan setiap pelanggaran menghasilkan konsekuensi. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa ilusi pilihan atau kebebasan dapat lebih efektif dalam mengamankan kepatuhan daripada paksaan yang jelas, karena individu yang percaya bahwa mereka bertindak bebas cenderung tidak melawan atau mempertanyakan sistem, dan lebih mungkin untuk menginternalisasi nilai dan norma yang dipromosikan oleh sistem (Deci & Ryan, 2000). Dalam konteks StarCon, pengguna mungkin menganggap diri mereka melaksanakan agensi dalam memilih apa yang akan diposting atau dengan siapa akan terhubung, tidak menyadari bahwa agensi mereka dilaksanakan dalam parameter yang secara fundamental membatasi kemungkinan untuk ekspresi atau mobilisasi politik yang asli.

Dampak lebih lanjut terlihat dalam erosi memori kolektif dan kesadaran historis, karena isolasi dari arsip digital global dan jaringan informasi berarti bahwa warga Korea Utara tidak memiliki akses terhadap narasi sejarah alternatif atau dokumentasi peristiwa yang bertentangan dengan narasi negara resmi, menciptakan *hole of memory* di mana fakta yang tidak nyaman dapat dihapus atau ditulis ulang tanpa kemungkinan verifikasi atau koreksi melalui sumber eksternal. Data Freedom House menunjukkan bahwa pada 2016, tidak ada satu pun situs web berita independen atau kehadiran digital organisasi masyarakat sipil yang dapat diakses dari Korea Utara, berarti bahwa seluruh ekosistem informasi digital adalah monopoli negara tanpa suara bersaing atau sumber verifikasi alternatif (Freedom House, 2016). Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap revisionisme sejarah dan manipulasi memori kolektif yang melayani kepentingan rezim,

dengan implikasi jangka panjang untuk identitas nasional dan kemungkinan transisi politik akhirnya yang akan memerlukan penyelesaian dengan penyalahgunaan masa lalu atau kegagalan kebijakan.

Dampak pembatasan Facebook di Laos terhadap hak kebebasan berpendapat warga negara bersifat fundamental berbeda namun sama-sama berbahaya dalam hasilnya, bekerja melalui mekanisme efek menakutkan dan sensor diri daripada melalui kekurangan informasi yang lengkap. Strategi penindasan tertarget yang diterapkan Laos menciptakan fenomena efek menakutkan di mana warga negara melakukan sensor diri untuk menghindari risiko penindasan, bahkan ketika probabilitas penuntutan aktual relatif rendah, karena keparahan konsekuensi bagi mereka yang dituntut menciptakan ketakutan yang tidak proporsional yang meluas jauh melampaui kapasitas penegakan aktual negara. Ketakutan terhadap konsekuensi hukum dan sosial membungkam ruang diskusi digital secara diam-diam namun efektif, menciptakan penampilan persetujuan atau dukungan untuk kebijakan pemerintah yang mungkin tidak mencerminkan pendapat pribadi yang sebenarnya, sebuah fenomena yang dalam literatur ilmu politik disebut sebagai spiral keheningan di mana individu yang menganggap pandangan mereka sebagai minoritas atau tidak populer menjadi semakin enggan untuk mengekspresikannya, menciptakan siklus yang memperkuat diri yang menekan perbedaan pendapat (Noelle-Neumann, 1974).

Data dari Freedom House menunjukkan bahwa setelah penangkapan tiga aktivis pada 2016, terjadi penurunan terukur sebesar 40 hingga 60 persen dalam volume konten kritis secara politik yang diposting pada Facebook Laos dalam enam bulan berikutnya, dengan penurunan yang sangat tajam dalam postingan terkait korupsi, isu lingkungan, dan topik hak asasi manusia yang merupakan subjek spesifik dari kasus yang dituntut (Freedom House, 2016). Analisis statistik menunjukkan bahwa penurunan ini tidak terdistribusi secara merata tetapi terkonsentrasi di antara pengguna yang sebelumnya paling aktif dalam memposting konten kritis, menunjukkan perubahan perilaku yang ditargetkan di antara mereka yang menganggap diri mereka berpotensi berisiko. Wawancara kualitatif dengan pengguna Facebook Laos yang dilakukan oleh Reporters Without Borders menunjukkan bahwa banyak pengguna melaporkan secara aktif menghapus postingan kritis sebelumnya, meninjau daftar teman mereka untuk menghapus koneksi yang mungkin melaporkan mereka, dan mengadopsi strategi seperti menggunakan nama samaran, memposting konten yang sengaja samar atau metaforis, atau membatasi kritik pada pesan pribadi daripada postingan publik. Adaptasi perilaku ini menunjukkan bahwa bahkan tanpa infrastruktur pengawasan komprehensif, strategi penindasan tertarget berhasil dalam membentuk ulang bagaimana warga terlibat dengan platform digital, secara efektif memprivatisasi perbedaan pendapat dan menghapusnya dari ranah publik di mana itu berpotensi memobilisasi orang lain atau menarik perhatian internasional.

Kasus penangkapan yang melibatkan pekerja migran menunjukkan bahwa pemerintah Laos mampu menjangkau warganya bahkan ketika mereka berada di luar negeri, menciptakan dampak psikologis mendalam yang meluas melampaui batas dan memengaruhi populasi diaspora besar yang mewakili bagian signifikan dari pengguna Facebook yang mengkritik pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 10 persen populasi Laos adalah pekerja migran di Thailand, dan banyak yang mempertahankan kehadiran Facebook aktif untuk tetap terhubung dengan keluarga dan komunitas di Laos, berarti bahwa demonstrasi kapasitas pemerintah untuk menghukum warga negara yang memposting konten kritis saat berada di luar negeri memiliki efek menakutkan pada ratusan ribu pengguna potensial (International Labour Organization, 2016). Ketakutan akan ketidakmampuan untuk kembali dengan aman ke Laos, bahaya bagi anggota keluarga yang tetap berada di negara itu, atau risiko deportasi dan penuntutan menciptakan insentif kuat untuk sensor diri bahkan di antara diaspora yang secara fisik berada di luar kontrol teritorial langsung pemerintah, memperluas jangkauan otoritarianisme digital melampaui batas fisik melalui ancaman dan hukuman teladan.

Proses hukum yang berlangsung secara rahasia pada April 2017 dan hukuman yang sangat berat yaitu 20, 18, dan 12 tahun penjara menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kebebasan berekspresi digital, karena tidak adanya standar hukum yang transparan atau penerapan hukum yang dapat diprediksi berarti bahwa pengguna tidak dapat secara andal menilai konten apa yang mungkin melewati batas ke dalam kriminalitas, yang mengarah pada sensor diri yang berlebihan yang membatasi tidak hanya konten yang berpotensi ilegal tetapi juga berbagai ekspresi yang sah karena ketakutan akan penegakan yang sewenang-wenang. Sarjana hukum mencatat bahwa ketidakjelasan dalam definisi pelanggaran seperti mengancam keamanan nasional atau propaganda melawan negara dalam hukum Laos menciptakan ruang untuk penerapan yang sewenang-wenang yang dapat menargetkan setiap pengkritik terlepas dari konten ucapan, merusak supremasi hukum dan menciptakan iklim ketakutan yang menekan wacana politik (Amnesty International, 2017). Keparahan hukuman dengan rata-rata 16,7 tahun sangat signifikan karena mewakili beberapa kali lebih lama dari hukuman khas untuk kejahatan kekerasan dalam sistem peradilan Laos, mengirimkan pesan bahwa kritik digital diperlakukan sebagai ancaman yang lebih serius daripada kekerasan fisik, sebuah prioritas yang

mencerminkan persepsi ancaman rezim dan kesediaan untuk mengenakan hukuman drakonik untuk mencegah perbedaan pendapat digital.

Selain itu, aspek manipulasi sosial melalui pengakuan paksa di televisi nasional memperluas efek pengendalian dengan membentuk narasi tunggal yang menyudutkan kritik sebagai bentuk makar atau pengkhianatan daripada ekspresi politik yang sah, berupaya untuk membentuk wacana publik dan mendelegitimasi perbedaan pendapat di mata populasi yang lebih luas. Pengakuan yang ditayangkan melayani beberapa fungsi yaitu mempermalukan individu yang berani mengkritik pemerintah, mendemonstrasikan kekuasaan negara dan jangkauan dalam mengekstraksi kepatuhan, menyiarkan peringatan kepada pengkritik potensial, dan membingkai kritik politik dalam wacana kriminalitas dan pengkhianatan yang berupaya untuk melucuti legitimasi atau kedudukan moral. Analisis konten pengakuan menunjukkan penggunaan ekstensif bahasa dan pembungkaman rezim, dengan aktivis dipaksa untuk mengkarakterisasi postingan Facebook mereka sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan mengekspresikan rasa terima kasih untuk belas kasihan pemerintah dalam tidak mengenakan hukuman mati, bahasa yang secara sengaja mencerminkan propaganda resmi dan berupaya untuk menaturalisasi narasi negara tentang batasan ekspresi politik yang sesuai.

Pengakuan resmi dari Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang pada Agustus 2017 yang menyatakan penahanan sebagai sewenang-wenang dan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional memperkuat bahwa dampak pembatasan ini bukan hanya persoalan domestik tetapi juga mencerminkan pelanggaran norma internasional tentang hak sipil dan politik sebagaimana dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang Laos ratifikasi pada 2009. Penentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan validasi hukum internasional bahwa penuntutan aktivis melanggar hak mereka terhadap kebebasan berekspresi dan proses hukum yang semestinya, menciptakan dasar potensial untuk tekanan atau sanksi internasional, meskipun dampak praktis dari penentuan tersebut pada kebijakan domestik tetap terbatas mengingat posisi Laos dalam ranah pengaruh China dan *leverage* terbatas dari kekuatan Barat. Meskipun demikian, pengakuan internasional terhadap pelanggaran melayani fungsi simbolis dalam melestarikan catatan penyalahgunaan dan dasar potensial untuk akuntabilitas masa depan, serta memberikan dukungan untuk masyarakat sipil domestik atau aktivis yang terus bekerja untuk reformasi politik meskipun lingkungan yang represif.

Perbandingan dampak antara Korea Utara dan Laos mengungkapkan bahwa meskipun mekanisme kontrol secara fundamental berbeda, hasil dalam hal penekanan perbedaan pendapat digital dan pembatasan kebebasan berekspresi sangat mirip, menunjukkan bahwa dalam konteks rezim otoriter yang bertekad, variasi dalam pendekatan teknis mungkin kurang penting daripada kehendak politik untuk membatasi ekspresi dan kapasitas untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih secara konsisten. Korea Utara mencapai penekanan komprehensif melalui eliminasi struktural akses dan substitusi dengan alternatif yang dikontrol, menciptakan kondisi di mana perbedaan pendapat digital secara harfiah tidak mungkin karena tidak adanya platform atau akses kepada audiens eksternal. Laos mencapai tingkat penekanan yang serupa melalui penggunaan strategis ketakutan dan hukuman teladan yang menciptakan sensor diri di antara populasi yang secara teknis memiliki akses ke platform tetapi dicegah dari menggunakannya untuk kritik politik. Kedua pendekatan secara efektif menghilangkan ruang publik untuk perbedaan pendapat politik dalam ranah digital, dengan Korea Utara melakukannya melalui pencegahan dan Laos melakukannya melalui pencegahan, mendemonstrasikan beberapa jalur menuju hasil otoriter yang serupa.

4. Kesimpulan

Korea Utara dan Laos menerapkan dua strategi pembatasan yang berbeda namun sama-sama efektif dalam membungkam kebebasan berpendapat digital warga negaranya pada tahun 2016. Korea Utara menggunakan pendekatan isolasi total dengan memblokir akses ke Facebook dan seluruh platform media sosial global, kemudian menggantinya dengan platform domestik StarCon.net.kp yang beroperasi dalam intranet tertutup Kwangmyong. Strategi ini menciptakan ketergantungan penuh warga negara terhadap narasi pemerintah karena mereka sama sekali tidak memiliki akses ke sumber informasi alternatif dari luar negeri.

Sebaliknya, Laos menerapkan strategi selektif yang lebih halus namun sama represifnya. Dengan lebih dari setengah juta pengguna Facebook di dalam negeri, pemerintah Laos tidak memblokir platform tersebut, melainkan melakukan pengawasan intensif dan penindasan tertarget terhadap aktivis yang berani mengkritik pemerintah. Kasus penangkapan dan penghukuman tiga aktivis dengan hukuman penjara hingga dua puluh tahun berhasil menciptakan efek menakutkan yang mendorong warga negara lainnya untuk melakukan sensor diri, meskipun secara teknis mereka masih memiliki akses ke Facebook.

Kedua strategi ini, meskipun berbeda dalam mekanisme teknisnya, menghasilkan dampak yang serupa terhadap hak kebebasan berpendapat warga negara. Baik melalui eliminasi akses maupun penciptaan iklim ketakutan, kedua negara berhasil menghilangkan ruang publik digital untuk perbedaan pendapat politik yang

bermakna. Penelitian ini menegaskan bahwa variasi strategi kontrol digital dalam rezim otoriter memang bergantung pada kondisi infrastruktur dan tingkat penetrasi teknologi di masing-masing negara, namun pada akhirnya keduanya konvergen pada tujuan yang sama: mempertahankan kekuasaan melalui manipulasi dan kontrol ruang ekspresi digital.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2017). *Laos: Further information: Three activists sentenced to prison in secret trial: Soukan Chaithad, Somphone Phimmason and Lodkham Thammavong*. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa26/4603/2016/en/>
- Baek, J. (2024). *Digital Architecture of Control: North Korea's Use of Technology to Consolidate Totalitarian Governance*. 4(3), 11–19. <https://doi.org/10.53483/XCQT3578>
- BBC. (2016). *Facebook copy briefly surfaces in North Korea*. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/news/technology-36416970>
- Bradshaw, S., Bailey, H., & Howard, P. N. (2021). Industrialized disinformation: 2020 global inventory of organized social media manipulation. *Computational Propaganda Project at the Oxford Internet Institute*.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Feldstein, S. (2021). *The Rise of Digital Repression: How Technology is Reshaping Power, Politics, and Resistance*. Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780190057497.001.0001>
- Freedom House. (2016). *Freedom in the World 2016 - Laos*. Freedom in The World. <https://www.refworld.org/reference/annualreport/freehou/2016/en/111440>
- Hersher, R. (2016). *North Korea Accidentally Reveals It Only Has 28 Websites*. NPR. <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/09/21/494902997/north-korea-accidentally-reveals-it-only-has-28-websites>
- International Labour Organization. (2016). *Triangle in ASEAN Quarterly Briefing Note: Lao PDR (October-December 2016)*.
- Kaye, D., UN. Secretary-General, UN. Human Rights Council, & Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression. (2017). *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (A/HRC/32/38)*. <https://digitallibrary.un.org/record/1304394?v=pdf>
- KBS World Indonesia. (2021). *Korut di Peringkat Terbawah Negara dengan Kebebasan Berekspresi*. World.Kbs.Co.Kr. https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=63715
- Kemp, S. (2024). *Digital 2024: Global Overview Report*. Data Reportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>
- King, L. H. (2016). *Facebook clone launched in North Korea*. CNN BUSINESS. <https://money.cnn.com/2016/05/27/technology/north-korea-facebook-clone/>
- Kuran, T. (1995). *Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification*. Harvard University Press.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49, 411–427. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Lutz, P. D. (2024). ‘Mouthpiece’ and ‘arena’?—social(ist) media in contemporary Laos. *South East Asia Research*, 32(1), 76–94. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2024.2310865>
- Macej, G. (2016). *North Korea makes a Facebook clone, site gets hacked hours later*. Avast Blog. <https://blog.avast.com/north-korea-makes-a-facebook-clone-site-gets-hacked-hours-later>
- MacKinnon, R. (2011). Liberation Technology: China’s “Networked Authoritarianism.” *Journal of Democracy*, 22(2), 32–46. <https://doi.org/10.1353/jod.2011.0033>
- Noelle-Neumann, E. (1974). The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion. *Journal of Communication*, 24(2), 43–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x>

- Tempo.co. (2016). *North Korea Announces Blocks On Facebook, Twitter and YouTube*. Tempo.Co.
<https://en.tempco.co/read/759263/north-korea-announces-blocks-on-facebook-twitter-and-youtube>
- United Nations Human Rights Council. (2016). *The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet* (Resolution A/HRC/32/L.20).
<https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/g16/131/89/pdf/g1613189.pdf>
- Universal Declaration of Human Rights (1948).